

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan suatu negara dalam panggung internasional kekinian mendesak akan adanya suatu ikatan hubungan kerjasama yang saling mendukung demi tercapainya kebutuhan antar masing - masing negara yang terlibat. Bahwa pengetahuan yang mendasar dalam hubungan internasional suatu negara adalah tidak dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan warganya jika tidak adanya interaksi kerjasama diluar internal batas suatu negara. Kodrat dan keberadaan dari masing – masing negara berbeda satu sama lain, ditinjau dari kepemilikan sumber daya alam, teknologi, sumber daya tenaga kerja, angkatan militer dan sebagainya. Kini ilmu hubungan internasional hadir dari landasan kebutuhan tersebut yang kini semakin semakin berkembang dan jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Bagaimana kemudian adanya suatu aturan, etika atau norma yang kemudian dapat mensinkronkan antara aktor dalam berhubungan internasional.

Republik Turki adalah sebuah negara besar yang terletak di kawasan *Eurasia* atau negara yang teritorinya terletak diantara daratan benua Eropa dan Asia, luas wilayahnya yang terbentang dari Anatolia di kawasan Asia Barat hingga ke Balkan di Eropa Tenggara sehingga Turki dikenal sebagai negara

transkontinental.¹ Ibu kota Turki adalah Ankara namun kota terbesar negara ini berada di Istanbul (bagian Eropa), disebabkan karena lokasinya yang berada dipersilangan dua benua sehingga adaptasi dari budaya negara ini yang kemudian mengalami asimilasi antara kultur timur (Asia) dan barat (Eropa). Pencampuran budaya Turki sering disebutkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban menempatkan Turki memperoleh kepentingan strategis dari sudut kepemilikan teritori.

Sejarahnya bahwa Kota Istanbul merupakan pusat perkembangan kebudayaan yang ada di Turki sejak dahulu kala sehingga melahirkan perpaduan bermacam – macam budaya yang dibawa oleh Bangsa Turki Usmani yang banyak mengambil ajaran etika, tata krama dan politik pada bangsa – bangsa lain.² Sejak dahulu Bangsa Turki memang senang berasimilasi dan berhubungan dengan bangsa lain misalnya dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan.

Sejak pendeklarasian kemerdekaan Republik Turki pada bulan Oktober 1923, kini negara tersebut berkembang sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kancah internasional. Dibawah pemerintahan presiden Erdogan pelibatan Turki dalam panggung internasional cukup diperhitungkan hingga negara ini dapat memperlihatkan kredibilitasnya sebagai salah satu negara yang juga dapat berpengaruh diantara negara – negara maju lainnya. Turki selama kurang lebih satu dasawarsa ini menjadi negara dengan

¹<http://www.diplomasi%20budaya/Turki%20-%20Indonesia/Turki.htm> diakses pada Tanggal. 31 – Maret 2015. Pkl 19.34 WIB

⁶Amin, Husain Ahmad. 2004. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm 34

kemajuan di berbagai bidang. Selama 11 Tahun Pemerintahan Erdogan Turki telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan pesat. Saat terpilih memimpin Turki, negaranya mewarisi utang 11,7 persen. Inflasi mencapai 30%. Saat itu Turki dipimpin militer dan menjadi negara sangat korup dan miskin.³

Indonesia sendiri sebagai negara yang berdaulat dan demokratis diketahui memang telah lama menjalin hubungan bilateral dengan Republik Turki sejak abad ke - 18 yakni ketika adanya interaksi perdagangan antara kedua negara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki secara konstitusi dimulai sejak adanya pengakuan Turki atas kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1947. Tetapi secara riil hubungan kerjasama yang dibangun khususnya dalam sektor kepariwisataan mulai ditingkatkan sejak 2 dekade terakhir. Melihat akan kebutuhan serta peluang pasar yang dapat dihasilkan dari bidang ini sehingga menempatkan sektor pariwisata sebagai komponen yang bersifat *vital* dalam politik luar negeri antara Indonesia dan Turki. Perkembangan hubungan kerjasama kepariwisataan kedua negara ini dapat ditunjukkan dari beberapa bentuk interaksi timbal balik baik berupa perjanjian maupun kegiatan kunjungan wisata. Sebagai contohnya yang pertama penandatanganan *Memorandum of Understanding MoU Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey On Cooperation in Tourism* (memorandum saling pengertian antara

³ “Kerjasama Turki dan Indonesia Menuju Kemandirian Alutsista” , dalam <http://www.pasberita.com> , diakses 1 April 2015, jam 20.45 WIB.

pemerintah republik Indonesia dan pemerintah republik Turki mengenai kerjasama pariwisata) Jakarta 6 Oktober 1993.⁴

Peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Turki dianggap cukup penting melihat keberadaan dari Republik Turki yang dapat menunjang kebutuhan nasional salah satunya dalam hal menuju kemandirian alutsista. Selain dengan Turki kerjasama militer Indonesia juga dilakukan dengan Rusia. Hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia kembali terjalin seiring dengan bangkit kembali Federasi Rusia. Penentuan dan pelaksanaan kerjasama pertahanan militer Indonesia dengan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat dipengaruhi oleh kondisi pertahanan militer Negara yang mencakup perkembangan alutsista Indonesia saat ini. Walaupun Amerika telah mencabut embargo terhadap Indonesia, hal ini tidak menutup niat dan tetap melakukan kerjasama militer bersama Rusia dan tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Kerjasama pertahanan ini juga bermanfaat bagi Indonesia selanjutnya, karena Indonesia tidak hanya tergantung pada satu Negara saja dalam hal pengadaan peralatan teknik militer dan penyediaan persenjataan. Kerjasama dengan Rusia bukan berarti Indonesia telah mengubah kebijakan luar negeri yang selama ini cenderung ke Barat. Tetapi, menunjukkan bahwa membuka kerjasama dengan Rusia adalah upaya pelurusan kembali praktek kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia tidak pernah memusuhi barat dan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan yang

⁴<http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/turki.htm> Update Mei 2008 .
Diakses pada, 16 Mei 2015 pukul 22.25 WIB

besar agar tidak selalu terhambat. Baik oleh hambatan politik atau hambatan lainnya.⁵

Selain kerjasama dengan Amerika dan Rusia, kerjasama kerjasama di bidang militer juga dilakukan dengan negara Turki dengan kapasitas dan segala bentuk kemajuan yang dimiliki untuk pengembangan ekonomi di Eropa dan pasar dunia dinilai semakin besar dengan prospek yang semakin baik. Selain itu tidak seperti kerjasama militer Indonesia dengan Amerika atau negara Eropa Barat, yang memberikan aturan-aturan tertentu dalam hal penggunaan persenjataannya, yang membuat Indonesia sebagai pengguna yang membeli alutsista dari mereka tidak leluasa dalam menggunakannya. Hal ini yang kemudian mendasari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kerjasama militer dengan Turki pada tahun 2010. Indonesia mengadakan penandatanganan kerjasama dengan Turki dalam industri pertahanan. Kerjasama ini diwujudkan dalam pembuatan kendaraan tempur tank tipe medium. Hal ini disampaikan Sesditjen Potensi Pertahanan Kemenhan Brigjen Santoso bahwa kerjasama membuat medium tank yang menggunakan canon dengan turret kaliber 90-105 mm. Durasinya tiga tahun, dua prototype, sama-sama dikerjakan ahli Pindad dan FNSS. Nanti satu medium tank dikerjakan di Pindad dan satu FNSS (Turki). Indonesia memilih Turki karena sudah membangun komitmen dengan pemerintah Indonesia era Susilo

⁵ Fardiansah Noor, “DPR Dukung Penuh Kebijakan Politik Bebas Aktif”, diakses dari: www.mediaindonesia.com . Pada tanggal 16 Mei 2015

Bambang Yudhoyono (SBY). Turki juga berkenan untuk melakukan transfer teknologi.⁶

Kerjasama di bidang industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki telah diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (*Agreement of Defence of The Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey*) yang ditandatangani di Ankara, Turki, pada tanggal 29 Juni 2010.

Draft dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki tersebut berupa : pertama, Kesepakatan Kerjasama di bidang industri pesawat tempur antara PT. DI telah siap melakukan kerjasama dengan Turkey Aerospace Industry (TAI) untuk kerjasama dalam pengadaan Alutsista sistem pertahanan udara. Kedua, Kesepakatan kerjasama di bidang industri matra darat antara PT. PINDAD telah siap melakukan kerjasama dengan FNSS Defence System Inc. dari pihak Turki. Dari dua kesepakatan tersebut, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah *joint production dan Transfers of Technology (ToT)* antara dua Industri pertahanan tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Turki.⁷

⁶ “Kerjasama Turki dan Indonesia Menuju Kemandirian Alutsista” , dalam <http://www.pasberita.com> , diakses 1 April 2015, jam 20.45 WIB

⁷ Kesepakatan Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Siap Ditandatangani, <http://www.defense.studies.com> diakses 1 April 2015. jam 20.55 WIB.

Beberapa bagian penting dalam RUU tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki diantaranya:

1. Kerjasama dalam bidang industri pertahanan meliputi penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi ruang lingkup teknis dalam hal penelitian bersama, pengembangan, produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah dan teknis, partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium, serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama industri pertahanan.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen kedua negara untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.⁸

Bangsa Indonesia, adalah bangsa yang cinta damai. Namun demikian, kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah juga merupakan kepentingan nasional yang sangat penting. Terkait dengan penambahan kualitas dalam bidang kekuatan militer, Turki menjadi salah satu negara yang tepat untuk menjalin kerjasama. Dibanding kerjasama militer dengan negara lain kerjasama militer dengan Turki memiliki keistimewaan karena pihak Turki menawarkan *Transfer of Technology* (ToT) dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan, lebih dari itu pihak Turki siap untuk bekerjasama dari awal proses yaitu *design* sampai akhir proses yaitu produksi.⁹

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa kebutuhan Indonesia akan senjata militer semakin besar. Sedangkan kerjasama dalam bidang keamanan dan militer yang dianggap paling signifikan, yaitu dengan kawasan seperti

⁸ Kerjasama Militer Indonesia Turki, dalam <http://dmc.kemhan.go.id>. diakses 2 April 2015. jam 19.30 WIB.

⁹ Ibid

Asia tenggara tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keamanan militer Indonesia. Kebutuhan ketahanan ini menuntut Indonesia untuk mencari strategi baru. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak alternatif kerjasama dengan berbagai negara selain Turki yang juga memiliki cadangan senjata. Walaupun Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai kawasan seperti Amerika Serikat dan Eropa, namun kerjasama tersebut tidak menjadi prioritas penguatan kerjasama. Hal ini karena Turki memiliki industri pertahanan yang sangat maju mengingat letak Turki yang strategis berbatasan dengan negara-negara Asia dan Eropa. "Karena posisi yang diapit banyak negara dan berpotensi konflik di perbatasan, maka Turki mengembangkan industri pertahanannya dengan sangat maju. Dengan adanya latar belakang yang di jelaskan pada bagian ini maka penulis tertarik untuk mengetahui Politik Luar Negeri Indonesia dan kerjasama internasional antara kedua Negara maka penelitian ini berjudul tentang **“Kepentingan Indonesia Menjalin Hubungan Kerjasama Militer Dengan Turki tahun 2010-2014”**”.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa jurusan hubungan internasional dalam hal politik Luar Negeri khususnya Negara Indonesia-Turki.

2. Untuk mengetahui kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait kerjasama Militer dengan Turki
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi Kerjasama Indonesia-Turki dalam pengambilan kebijakan Luar Negeri Kerjasama di bidang militer.
4. Sebagai perwujudan atas teori-teori yang penulis terima di bangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
5. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan starta (S-1) pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan:

Penejelasan dari permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan rumusan masalah sebagai berikut :

Mengapa Indonesia menjalin kerjasama militer dengan Turki tahun 2010-2014?

D. Kerangka Dasar Pemikiran:

Untuk melihat permasalahan di atas, digunakan kerangka pemikiran, baik teori maupun konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan. Sebelum menguraikan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain

dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini, secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi.¹⁰ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu atau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecilkecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign policy, Yaitu :¹¹

“apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

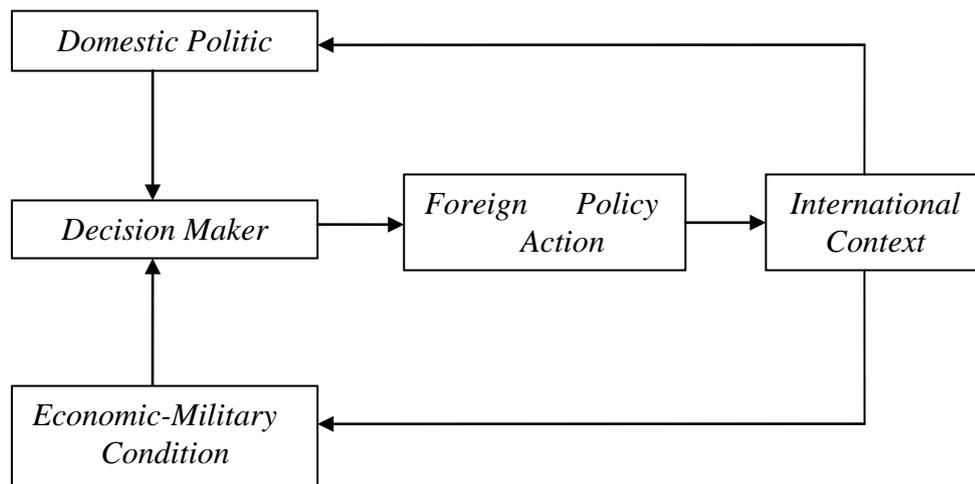
¹⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*, Yogyakarta: LP3ES,1990, hal.109

¹¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, (Bandung ,Sinar Baru:1992) Hal.30.

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1
Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri



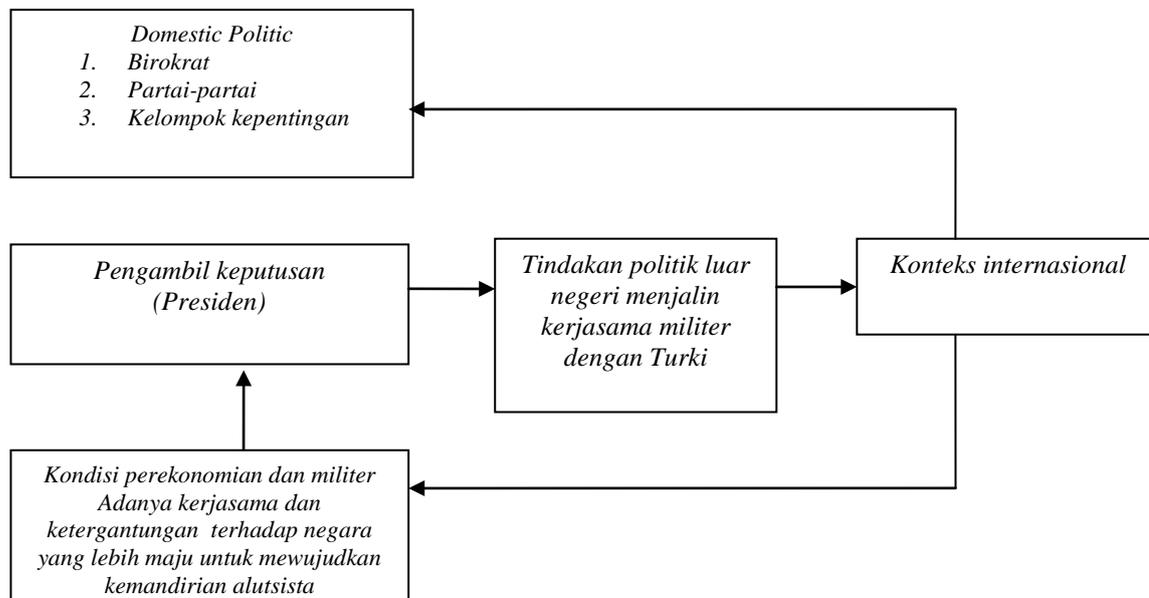
Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Menurut gambar di atas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional akan tetapi pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini presiden sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai

akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam Politik dalam Negeri pengambil keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan Negara atau pribadi dari pengambil keputusan ini.

Sebelum penjelasan yang lebih jauh, akan penulis gambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut sebagai berikut:

Gambar 2
Aplikasi gambar teori pengambilan keputusan Luar Negeri Wiliam D.Coplin
Politik Luar Negeri



Fokus penelitian diletakkan pada kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer dan konteks Internasional, ketiga faktor tersebut memang sesuai dengan apa yang melandasi terciptanya kebijakan menjalin kerjasama militer dengan Turki. Dimana kondisi politik dalam negeri, kepentingan ekonomi dan militer dan faktor konteks Internasional sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan Luar Negeri.

Jika dilihat dari situasi politik dalam negeri, kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada kolaborasi antar pengambil keputusan (*decision makers*) dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan "*policy influences*" (yang mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut "*policy influences system*" (sistem pengaruh kebijakan).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri dalam konteks kerjasama militer dengan Turki telah disahkan oleh DPR dalam sebuah Undang-Undang No 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (*Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey*).

Kepentingan di bidang ekonomi adalah dengan kerjasama militer dengan Turki juga dilakukan kerjasama alih teknologi sehingga Indonesia dapat mempunyai teknologi secara mandiri dan dapat memproduksi teknologi militer yang dapat diterapkan di Industri dalam negeri untuk menunjang kebutuhan militer Indonesia dalam mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia. Selain itu juga Indonesia dan Turki membuat delapan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh para menteri dan pejabat kedua negara. Nota itu terdiri atas kerja sama kementerian luar negeri, pertahanan, perindustrian, kebudayaan dan pariwisata, transportasi, ketenagakerjaan, investasi, dan penyiaran televisi.

Presiden mengaku optimis kerja sama ekonomi itu bisa ditingkatkan lagi. Apalagi kedua bangsa telah saling berhubungan sejak abad ke-16. Karena itu SBY mengundang investor Turki untuk datang ke Indonesia.

Sedangkan dalam hal kemampuan atau kondisi militer, dalam suatu negara perlu ditetapkan dulu kriteria terpenting dalam kekuatan militer, dalam kekuatan militer, yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan perangnya. Kita mungkin bisa mempersoalkan perbedaan antara yang terlatih dengan yang diperlengkapi dengan baik, karena kita bisa memperoleh (atau sudah memperoleh) tenaga-tenaga ahli dan terlatih, yang diperlukan untuk menggunakan dan memelihara perlengkapan itu. Namun, karena negara terbelakang mungkin mampu memperoleh perlengkapan yang canggih dari negara-negara maju, negara-negara tersebut juga mungkin kekurangan tenaga yang cukup terampil dan terlatih, untuk menangani perlengkapan tersebut. Dan perlu ditekankan bahwa pelatihan bukan sekedar masalah keterampilan teknis dalam menangani mesin perang tapi juga pengembangan kapasitas manusia untuk bertempur dengan baik, serta untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kondisi perang. Jadi, kemampuan untuk bertempur tidak selamanya bisa diukur hanya melalui jumlah pasukan atau perlengkapan karena jumlah pasukan kurang berarti jika dibandingkan dengan pelatihan dan jenis perlengkapan.¹²

Setelah menaksir kemampuan militer suatu negara, kita perlu mengetahui apakah sumber-sumber kemampuan itu berasal dari luar negeri atau

¹² John McCormick, *Comparatives Politics In Transition*, Thomson wads worth.

dalam negeri, karena makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang kekuatan angkatan bersenjata, makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar, dalam menggunakan kekuatan, karena seluruh ekonomi dunia taraf tertentu berkaitan dengan perdagangan, dan karena banyak barang yang diperdagangkan itu berhubungan dengan industri pertahanan, semua negara sedikit banyak bergantung pada negara-negara lain dalam kekuatan militernya. Dan ketergantungan ini mempunyai dampak terhadap kedua negara karena biasanya pemasok memperoleh kontrol tertentu atas negara pembeli. Ketergantungan suatu negara pada pemasok perlengkapan itu. Hal itu menyangkut pengadaan suku cadang, untuk pemeliharaan pada masa damai serta pada masa perang, termasuk penggunaan penasihat asing untuk menggunakan perlengkapan itu dengan tepat. Jadi, dalam beberapa hal negara-negara yang memasok perlengkapan militer bisa berpengaruh terhadap negara-negara yang menerima. Selain itu, penasihat-penasihat militer yang dikirim ke negara-negara terbelakang untuk membantu mereka dalam masalah-masalah teknik, sering melakukan tekanan politis umum sehingga kadang negara pemasok bisa memaksakan kepentingannya di negara penerima dan cenderung memperlakukan negara penerima sebagai wilayah kompetisi diantara mereka. Dengan menolak menepati perjanjian investasi atau secara fisik memboikot atau memblokade negara-negara terbelakang. Akan tetapi negara maju juga bisa memberikan bantuan kepada negara berkembang atau terbelakang berupa bantuan modal, stabilitas politik dalam negeri, dan lain-lain.¹³ Apabila kita terapkan dalam kebijakan kerjasama militer dengan Turki

¹³ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah teoritis*, edisi ke-2 (bandung: sinar Baru, 1992), Hal. 126.

berkenan untuk melakukan transfer teknologi, dengan alih teknologi di bidang militer Indonesia dapat meningkatkan kemampuan teknologi militer secara mandiri. Kepentingan menjalin kerjasama dengan Turki dapat membantu memodifikasi pesawat patroli maritim, selain itu Indonesia juga menjajaki bisa mendapatkan komponen atau suku cadang untuk pesawat tempur F16 yang selama ini masih tergantung dari produsen asal pesawat tersebut, yaitu Amerika Serikat. "Turki sudah bisa membuat F16 sehingga bisa memanfaatkan agar kita bisa mendapat kemudahan untuk mendapat komponen pesawat. Selama ini, komponen pesawat F16 kita tergantung AS."¹⁴

Dilihat dari Konteks Internasional dengan menjalin kerjasama dengan Turki yang mencakup berbagai bidang seperti sosial, politik, maupun keamanan. Apalagi kedua negara sama-sama anggota G-20, pendiri D-8, dan anggota OKI. Ia juga berharap kedua negara bisa berkolaborasi dan saling mendukung di forum-forum PBB disamping Turki juga merupakan anggota NATO.

2. Konsep Kerjasama

K.J. Holsti menyatakan bahwa sebagian besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah internasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merunding, atau membahas masalah, mengemukakan, bukti teknis

¹⁴<http://www.tempointeraktif.com>, *Kerjasama dengan Turki, CN 235 akan Dimodifikasi*, diakses 17 Mei 2015, jam 20.30 WIB.

untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.¹⁵

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.

Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kerjasama bidang ekonomi bisa terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi dan pemberian bantuan baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman luar negeri. Menurut K. J. Holsti bantuan luar negeri, pengiriman uang, barang, atau nasehat teknis dari sebuah negara donor kepada negara penerima merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Pada masa lampau instrumen itu tidak digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang.

Hubungan kerjasama militer Indonesia -Turki dalam periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terbina dengan baik hal ini dibuktikan dengan disahkannya UU No 19 Tahun 2014 tentang *Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey*. Pada masa ini, hubungan Turki

¹⁵ K. J. Holsti, “*Politik Internasional: Kerangka untuk Analisa*”, Edisi Keempat, Jilid Kedua, alih bahasa : M. Tahir Azhary, Erlangga, Jakarta 1988, hal.209

dengan Indonesia berlangsung baik dan tidak ada ketegangan di antara kedua belah pihak. *Track record* saling kunjung antar kepala negara atau pemerintahan dan pejabat tinggi tingkat menteri beserta hasilnya yaitu Interaksi pada tingkat kepala negara dan pejabat tinggi mulai berkembang menjadi bagian penting tradisi hubungan Indonesia-Turki. Hasil-hasil interaksi tersebut tampak mulai memperkaya mekanisme pelaksanaan kerjasama kedua negara.

Di dalam kesepakatan kerjasama di bidang militer banyak kalangan menilai bahwa presiden berhasil memasukkan klausul alih teknologi. Alih teknologi dalam bidang militer sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara luar yang sistem persenjataannya lebih maju. Kerjasama dengan Turki ini memang merupakan salah satu cara Indonesia untuk membangun profesionalisme militer Indonesia yang sekarang ini kekurangan perlengkapan militer dan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap AS dalam bidang persenjataan yang sekarang ini sudah mencapai 65 persen.

D. Hipotesa

Kepentingan Indonesia menjalin kerjasama militer dengan turki dipengaruhi:

1. Faktor politik dalam negeri yaitu adanya persetujuan DPR untuk menjalin kerjasama militer dengan Turki melalui UU No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Militer dengan Turki yang telah disepakati oleh DPR dan eksekutif

2. Kepentingan ekonomi adalah kerjasama ini sebagai penghubung kerjasama di bidang ekonomi dengan Turki dan bertujuan untuk meningkatkan investasi Turki di Indonesia
3. Kepentingan militer yaitu untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan membangun profesionalisme militer Indonesia untuk modernisasi dan produksi alat-alat pertahanan serta pertukaran informasi seperti memodifikasi pesawat patroli maritim, produksi tank medium untuk kepentingan nasional dan untuk mendapatkan komponen atau suku cadang untuk pesawat tempur F16 yang selama ini masih tergantung dari Amerika.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yaitu menggambarkan kepentingan Indonesia dalam kerjasama militer Indonesia Turki. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku diobservasi, sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Penulis perlu menggabungkan dua jenis penelitian ini dikarenakan diperlukannya data-data kuantitatif untuk menunjang dalam mendeskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Data dan jenis

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal

yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching diberbagai website di internet.¹⁶

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini menggunakan jangkauan sekitar tahun 2010 semenjak kesepakatan kerjasama Militer Indonesia Turki yang merupakan awal komitmen Presiden SBY dalam membangun kerjasama militer dengan Turki sampai tahun 2014 dengan disahkan UU No 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan tidak menutup kemungkinan di luar tahun tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Berisi Pendahuluan yang meliputi, alasan penulisan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan

¹⁶ Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996, hal 47.

penelitian serta sistematika penulisan

Bab II Berisi tentang Dinamika politik Turki.yang meliputi Gambaran Umum Turki, Sistem pemerintahan Turki, Sistem Politik Turki, dan militer Turki.

Bab III Berisi tentang Dinamika Kerjasama Turki -Indonesia

Bab IV Berisi tentang aktor-faktor penyebab Indonesia Menjaln Kejasama dengan Turki di yaitu kepentingan Ekonomi, Militer dan Konteks Internasional

Bab V Kesimpulan